

## PENGARUH DIFERENSIASI UPAH ANTAR PROPINSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA

Bambang Setiaji & Sudarsono

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

### Abstrak

*This research aims to examine the effect of wages differentiation on employments. The policies of wages differentiation are observed from minimum sector wages which is still done in some provinces. The differentiation itself is aimed to exhaust the customer's surplus. The research shows that the more wages differentiation the more employments will be offered. But, unfortunately some provinces still set high minimum sector wages. This case will cause negative effect on empowerment, and on the other hand in limited formal manufacturing industries will reduce the gap of distribution of value added between the employers and the workers.*

**Keywords:** wage differentiation, employment, industry, and region studies

### PENDAHULUAN

Riset ini bertujuan untuk mengkaji diferensiasi upah (harga tenaga kerja) dan pengaruhnya terhadap permintaan kerja antar industri dan antar propinsi di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan dalam penelitian tahap pertama, beberapa propinsi pada tahun 2002 masih menetapkan upah minimum sektoral propinsi atau UMSP (<http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/upah/Upah.htm>). Akan tetapi, mulai 2003 diferensiasi upah ditetapkan menurut perbedaan kota atau kabupaten saja. Hal tersebut menunjukkan terjadinya perubahan kebijakan diferensiasi harga tenaga kerja yang semula divariasikan berdasar kemampuan membayar suatu industri di dalam propinsi, sekarang menjadi diferensiasi berdasar wilayah administratif. Diferensiasi upah yang didasarkan atas industri (sektoral) lebih bersifat ekonomis daripada diferensiasi upah yang didasarkan pada administratif.

Diferensiasi upah yang merupakan harga tenaga kerja memiliki dua tujuan, pertama, bertujuan mengakomodasi pembeli marginal yaitu industri yang memiliki kemampuan membayar rendah, dan kedua,

bertujuan memperbaiki tingkat pembagian nilai tambah antara pekeja dan pengusaha. Penetapan upah minimum yang bervariasi dapat dikaitkan dengan diferensiasi harga. Tujuan dari diferensiasi harga adalah menghabiskan surplus dari pembeli atau pengguna tenaga kerja. Jika diferensiasi harga dilakukan ke atas, ini berarti mengambil surplus dari pembeli kaya yang dapat diartikan sebagai usaha perbaikan *sharing* antara pekerja dan pengusaha.

Sebaliknya, jika diferensiasi dilakukan ke bawah, ini berarti ingin mewedahi pembeli tenaga kerja pada industri yang memiliki produktivitas rendah. Dalam literatur ekonomi industri, upah yang tinggi bisa digunakan sebagai *barrier to entry* bagi *entrant*. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dikaitkan, benarkah perbedaan kesempatan kerja tersebut dipengaruhi oleh diferensiasi upah yang dilakukan di berbagai propinsi?

### TUJUAN PENELITIAN

Mengkaji perbedaan upah minimum dan upah aktual di berbagai propinsi yang menetapkan upah lebih bervariasi dan yang kurang bervariasi. Untuk mengkaji apakah

upah dasar dari propinsi yang menetapkan upah minimum sektoral bersifat *floor price*, *ceiling price* atau *medium price*. Meneliti pengaruh Diferensiasi Upah Minimum terhadap kesempatan kerja antar propinsi di Indonesia.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Sejak otonomi daerah penentuan upah minimum yang semula ditetapkan oleh Menteri, didelegasikan menjadi kewenangan Gubernur. Terdapat kekhawatiran bahwa di daerah para pejabat pemerintah lebih lemah sehingga cenderung mengambil kebijakan populis berupa peningkatan upah minimum yang sering dan tinggi persentasenya. Hal tersebut merupakan kebijakan yang berorientasi jangka pendek dan kurang memperhatikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (SMERU, 2001).

Di berbagai propinsi ternyata penetapan upah minimum berbeda-beda, baik besarnya, persentase kenaikan setiap tahun, sistem penetapannya, dan ruang lingkup yang ditetapkan. Beberapa propinsi menetapkan upah minimum tunggal dan beberapa menetapkan upah minimum sektoral. Upah minimum tunggal bersifat kaku. Upah minimum tunggal berdampak kepada perbaikan upah pekerja tetap pada industri marginal. Akan tetapi studi tim SMERU (2001) juga menunjukkan bahwa upah minimum (tunggal) menyebabkan kesempatan kerja kelompok bawah menurun, terjadi substitusi terhadap penggunaan kapital, dan peningkatan pekerja *white collar* dengan elastisitas yang cukup tinggi.

Beberapa propinsi di Indonesia menetapkan upah minimum sektoral dengan derajat yang kurang bervariasi sampai sangat bervariasi, seperti Sumatra Utara dan Kalimantan Selatan (Setiaji, B. dkk. 2003). Beberapa propinsi suatu tahun sering menetapkan upah sektoral dan pada tahun yang lain dihapuskan, dan muncul lagi, misalnya seperti DKI, Jawa Tengah.

Upah minimum sektoral mengurangi dampak kekakuan upah, karena harga (upah) terdeferensiasi sedemikian rupa sehingga dapat mewadahi berbagai industri yang berbeda dalam produktivitas, jaringan pasar, sumber modal ukuran perusahaan, penggunaan kapital dan akhirnya berbeda dalam *Return on Investment* (ROI). Diferensiasi harga tersebut sangat cocok dengan kondisi industri Indonesia yang sangat beragam.

Upah minimum sektoral merupakan upah yang ditetapkan sesuai dengan prinsip teori diferensiasi harga. Dalam buku teks mikro ekonomi, diferensiasi harga adalah upaya untuk menyerap surplus pembeli. Dalam hal ini ada dua hal pengertian menyerap surplus. Pertama, jika diferensiasi harga ke bawah bertujuan melayani pembeli marginal, dan kedua, jika diferensiasi ke atas bertujuan menyerap surplus daya beli. Jika berada di antara keduanya, tentulah bertujuan memperbaiki harga tenaga kerja dan sekaligus memberi kesempatan pembeli atau industri dengan produktivitas marginal.

Sejalan dengan pemikiran atau teori di atas, maka prinsip upah minimum sektoral di samping bersifat diferensiasi, juga lebih mengandung unsur *rent sharing*. *Rent sharing* merupakan salah satu aspek dari teori upah efisiensi dimana diramalkan bahwa pengusaha yang memiliki keuntungan lebih tinggi akan memberikan upah lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, atau mengurangi biaya kontrol, *shirking habit*. *turn over* tinggi dan intrik yang berpotensi memberi kerugian lebih besar (Blancflower. et.al. 1996).

Beberapa studi berkaitan dengan masalah ini misalnya yang dilakukan oleh Islam dan Nazara (2000) yang melakukan pengamatan pada masa Orde Baru. Pada masa itu tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kenaikan upah dan pengangguran. Dengan kata lain, kenaikan upah yang dilakukan melalui kebijakan Upah Minimum pada masa Orde Baru tidak

mendorong pengangguran. Hal ini berarti bahwa kenaikan upah tersebut masih *reasonable* dihadapan pengusaha. Studi Ghelab (1998). dengan menggunakan data sebelum krisis menunjukkan hubungan kenaikan upah minimum terhadap pengerjaan kelompok muda memiliki arah yang negatif, tetapi parameternya kecil dan secara statistik juga kurang signifikan. Dengan kata lain kebijakan upah sebelum krisis tidak berdampak pengurangan pekerjaan.

Sebaliknya pada saat krisis, studi lembaga penelitian SMERU (2001) setelah adanya otonomi daerah, pemerintah kota cenderung populis, kecenderungan kenaikan upah minimum yang pesat berdampak terhadap hilangnya kesempatan kerja dan sekaligus pendapatan pekerja rawan seperti pekerja usia muda, pekerja tidak tetap, dan pekerja perempuan.

#### METODE PENELITIAN

1. Untuk mengkaji upah relatif antarpropinsi, digunakan perbandingan upah minimum propinsi pada tahun tertentu terhadap PDRB perkapita pada tahun yang sama. Pada riset ini digunakan data tahun 2001. Selanjutnya perlu dilihat bagaimana diferensiasi upah sektoral bergerak ke atas maupun ke bawah dari *benchmark* tersebut.

Benchmark upah =

$$\frac{UMP_i}{PDRB_{perkapita_i}} / \frac{UMP_{Nas}}{PDB_{perkapita}}$$

Di mana  $UMP_i$  adalah Upah Minimum Propinsi pada propinsi  $i$ , dan  $PDRB_{perkapita_i}$  sudah jelas merujuk.  $UMP_{Nas}$  adalah UMP rata-rata nasional dan  $PDB_{Kapita Nas}$  sudah jelas. Selanjutnya  $UMSP$  per industri dibandingkan terhadap *benchmark* tersebut yang hasilnya menggambarkan sejauh mana upah minimum terdeferensiasi.

2. Untuk menguji perbedaan dampak penetapan  $UMSP$  antarpropinsi terhadap kesempatan kerja, digunakan ana-

lisis regresi dua tahap dengan menggunakan model berikut.

$$kk_{ijk} = a + b_1 sales_{ij} + b_2 kl + b_3$$

$$DASING + b_4 CR4_j + \sum \hat{c}_k prop_k + e.. \quad (1)$$

$$\hat{c}_k = a + g_1 UMP_1 + g_2 UMP_{5+3} + g_3 UMSP_{10} + g_4$$

$$UMSP_{20+5} + g_5 UMSP_{>20} + g_6 UMP_{PDRB} \dots \quad (2)$$

di mana,  $kk_{ijk}$  adalah tenaga kerja pada perusahaan  $i$ , industri  $j$ , sales  $ij$  adalah penjualan per tenaga kerja pada perusahaan  $j$ ,  $kl$  adalah kapital.  $DASING$  adalah modal asing.  $CR4_j$  adalah rasio konsentrasi 4 artinya output industri besar dibagi total output industri  $j$ .

$\sum \hat{c}_k prop_k$  adalah jumlah vektor koefisien variabel *dummy* propinsi.  $UMP_1$  adalah variabel *dummy* upah minimum propinsi tunggal.  $UMP_5$  adalah variabel *dummy* upah minimum propinsi sektoral 2 sampai 5 jenis industri.  $UMSP_{10}$  adalah variabel *dummy* upah minimum sektoral propinsi 6 sampai 10 jenis industri.  $UMSP_{20}$  adalah variabel *dummy* upah minimum sektoral propinsi 11 sampai 20 jenis industri.  $UMSP_{>20}$  adalah variabel *dummy* upah minimum sektoral propinsi lebih dari 21 jenis industri.

3. Data yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan data mentah yang direkam dalam *compact disk* sektor industri Indonesia yang berasal dari survei Biro Pusat Statistik, data 1999 dan 2001, dan data dari Depnakertrans. Kedua data dokumenter dapat diperoleh melalui situs internet ([www.nakertrans.go.id](http://www.nakertrans.go.id) dan [www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id)). Data industri yang dikumpulkan oleh BPS meliputi industri sedang dan industri besar yang perusahaan-perusahaan tersebut diklasifikasikan menurut kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI).

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh BPS adalah survei dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada semua industri besar dan sedang yang ter-

catat dalam direktori BPS, dengan demikian merupakan survai lengkap. Selanjutnya, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS. Sejumlah observasi tidak diikuti karena bersifat *outliers*, dan karena informasi yang diberikan oleh responden tidak lengkap.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana tujuan penelitian yang pertama dan kedua, akan dibahas posisi upah minimum di berbagai propinsi. Tabel 1, memberi informasi posisi upah minimum dibanding PDRB perkapita per bulan. Rasio UM terhadap PDRB terendah terjadi di Kalimantan Timur dengan rasio 0,12, dan DKI dengan rasio 0,23. Di kedua propinsi peran faktor-faktor non kerja sangat tinggi dalam membentuk PDRB. Di Kaltim peran minyak dan di Jakarta peran sebagai pusat kekuasaan, termasuk didalamnya kekuasaan mencetak uang, menjadi penerima rente dari seluruh faktor produksi dan aneka surplus dari daerah. Daerah-daerah di mana kerja dan SDM merupakan faktor produksi yang penting memperlihatkan rasio UM terhadap PDRB yang tinggi. Hal tersebut terlihat di Jawa, Sumatera Utara, dan Lampung. Beberapa daerah di mana Upah Minimum lebih tinggi dari PDRB disebabkan oleh rendahnya PDRB itu sendiri. Hal ini terlihat di NTT dan beberapa propinsi di Sulawesi kecuali Sulawesi Utara yang menentukan upah terlalu tinggi dibanding daerah lain. Akhirnya, rata-rata upah minimum di Indonesia sekitar setengah dari produk domestik bruto. Mengingat sumbangan sektor industri relatif tinggi kepada PDB atau PDRB dibanding dengan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, maka pembagian nilai tambah atau surplus yang dicapai oleh tenaga kerja di sektor industri relatif rendah.

Dilihat dari level PDRB di propinsinya NTT menunjukkan kebijakan upah paling populis, dengan perbandingan upah minimum terhadap PDRBnya hampir 4 kali

lipat dari rata-rata nasional. Sebaliknya, KALTIM dan DKI paling *conservative* dengan hanya seperempat dan kurang dari setengah rata-rata nasional. Pada kedua propinsi di atas, diperkirakan para buruh tidak dapat melakukan *bargain* dengan pihak di luar perusahaan yang memperoleh pendapatan tinggi yang pada gilirannya mendorong meningkatnya konsumsi dan biaya hidup.

Sumatera Utara merupakan propinsi yang mendeferasiasikan UM paling banyak. Pada tabel 2, dilaporkan upah minimum sektoral, Sumatera Utara menetapkan 42 upah minimum pada berbagai jenis industri pengolahan. Sektor-sektor lain seperti pertanian, konstruksi, perhotelan juga terkena penetapan upah tersebut.

Dibandingkan dengan PDRB perkapita di Sumatera Utara sebesar 487.940 sebulan, upah minimum sektoral tersebut terdiferensiasi dari 0,7 sampai 0,77. Level diferensiasi upah di propinsi-propinsi lain terlihat pada kolom 4. Level diferensiasi upah ini diduga menyebabkan kesempatan kerja yang semakin turun, sebagaimana terlihat pada analisis di belakang.

Untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga, digunakan model regresi dua tahap. Regresi tahap pertama bertujuan untuk melihat perbedaan antar propinsi dalam kesempatan kerja. Parameter-parameter yang diperoleh diharapkan menangkap kebijakan antar propinsi terhadap kesempatan kerja. Kebijakan umum propinsi yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja adalah UMP atau UMSP, dan kondisi umum propinsi ditangkap oleh variabel PDRB. Tabel 3 melaporkan hasil regresi dengan variabel penjelas sebagaimana kolom pertama. Pengaruh propinsi ditangkap dengan *dummy*. Konstanta menggambarkan *benchmark* kesempatan kerja di salah satu propinsi. Beberapa propinsi terlihat bertanda negatif yang berarti mengalami kesempatan kerja sektor industri yang relatif lebih rendah.

Propinsi-propinsi dimaksud yang memiliki ranking penyerapan tenaga kerja terendah adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Utara, Bengkulu, DIY dan seterusnya terlihat sebagaimana kolom dua.

Propinsi-propinsi dengan tanda positif memperlihatkan pengurangan kesempatan kerja yang lebih rendah dari -7060, propinsi-propinsi tersebut antara lain DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, Kalimantan Tengah dan sebagainya.

**Tabel 1.** Upah Minimum Propinsi, PDRB Perkapita dan Prosentase UMP terhadap PDRB Perkapita, 2001

Kode Propinsi	Propinsi	UMP (Rp)	PDRB/Kapita/bulan (Rp)	Rasio UMP thd PDRB	RasioUM Propinsi ke Nasional
11	Aceh	300.000	606.858	0,49	0,94
12	Sumatera Utara	340.500	487.940	0,70	1,35
13	Sumatera Barat	250.000	438.699	0,57	1,10
14	Riau	329.000	780.547	0,42	0,81
15	Jambi	245.000	312.813	0,78	1,50
16	Sumatera Selatan	255.000	551.584	0,46	0,88
17	Bengkulu	240.000	241.371	0,99	1,90
18	Lampung	240.000	287.439	0,83	1,60
31	DKI Jakarta	426.250	1.867.784	0,23	0,44
32	Jawa Barat	245.000	345.344	0,71	1,37
33	Jawa Tengah	245.000	315.960	0,78	1,50
34	DIY	237.500	346.036	0,69	1,33
35	Jawa Timur	220.000	424.706	0,52	1,00
51	Bali	309.750	436.611	0,71	1,37
52	NTB	240.000	248.113	0,97	1,87
53	NTT	275.000	133.446	2,06	3,96
61	Kalimantan Barat	304.500	368.991	0,83	1,60
62	KalTeng	362.000	487.839	0,74	1,42
63	KalSel	295.000	493.763	0,60	1,15
64	KalTim	300.000	2.449.914	0,12	0,23
71	Sulawesi Utara	372.000	344.263	1,08	2,08
72	Sulawesi Tengah	245.000	309.528	0,79	1,52
73	Sulawesi Selatan	300.000	274.992	1,09	2,10
74	SulTeng	275.000	262.178	1,05	2,02
81	Maluku	230.000	189.683	1,21	2,33
Indonesia/rata-rata		<b>307.173</b>	594.769	0,52	1,00

Sumber: diolah dari [www.Depnakertrans.go.id](http://www.Depnakertrans.go.id) dan [www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id)

**Tabel 2.**  
 Pengaruh Variabel Sales Modal dan Konsentrasi 4 tiap Propinsi  
 terhadap Kesempatan Kerja

Variabel	Koefisien	t
Konstanta	-7.060,918	-1,160
SALES	,001	0,423
CR4	37.184,293	28,686
Sumatera Utara	-9.326,058	-1,492
Sumatera Barat	-3.318,483	0,465
Riau	9.231,912	1,407
Jambi	-3.857,627	0,518
Sumatera Selatan	-5.651,045	0,813
Bengkulu	-7.800,771	0,590
Lampung	-907,447	0,133
DKI Jakarta	2.181,942	0,355
Jawa Barat	6.969,513	1,142
Jawa Tengah	23.716,969	3,880
DIY	-7.699,781	-1,183
Jawa Timur	-1.127,752	0,185
Bali	31.379,813	4,781
NTB	-5.366,540	-0,752
NTT	99.310,725	8,884
Kalimantan Barat	9.251,240	1,298
Kalimantan Tengah	27.283,712	3,245
Kalimantan Selatan	8.274,411	1,137
Kalimantan Timur	-1.853,152	-0,253
Sulawesi Utara	-10.423,520	-1,293
Sulawesi Tengah	-12.597,822	-1,304
Sulawesi Selatan	4.671,257	0,702
Sulawesi Tenggara	159.301,579	20,666
Maluku	-10.745,305	-1,023
KAPITAL	-2.751E-05	-0,818
DASING01	-70,231	-4,809
R <sup>2</sup>		0,136
Uji F		95,947

Sumber: BPS diolah

**Tabel 3.**  
Pengaruh Tingkat Diferensiasi Upah dan UMP per PDRB terhadap Kesempatan Kerja antar Propinsi, data 2001

Variabel	Koefisien	t
Konstanta	-934.374,281	-73,617
UMP10	911.996,375	41,644
UMP20	879.630,060	21,420
UMP_20	902.248,898	65,776
UMP1	923.585,553	79,917
UMP_PDRB	36.362,740	5,219
R <sup>2</sup>		0,232
Uji F		1.294,599

Sumber: BPS diolah

**Pengaruh Tingkat Diferensiasi Upah terhadap Kesempatan Kerja antar Propinsi**

Analisis ini didasarkan pada regresi tahap kedua, dengan model yang menjelaskan lebih jauh variabel kebijakan propinsi. Yang dimaksud kebijakan disini adalah besar penetapan UM dibanding PDRB (UMP per PDRB), dan pengaruh diferensiasi upah (UMSP) yang umumnya merupakan diferensiasi ke atas. Karena diferensiasi upah ke atas bertujuan memperbaiki *sharing* pekerja terhadap pengusaha melalui penyerapan konsumer surplus, tidak lain adalah daya beli perusahaan, maka hipotesis yang diuji adalah semakin besar diferensiasi upah, semakin kecil kesempatan kerja.

Dengan menggunakan variabel dari berbagai level diferensiasi upah, maka parameter yang diperoleh dapat dimaknai sebagai perbedaan dampak diferensiasi upah dibanding konstanta. Konstanta sendiri menggambarkan rata-rata kesempatan kerja pada diferensiasi upah 2 sampai 5, dengan nilai -934.373, menggambarkan hubungan level diferensiasi upah 2 sampai 5 dengan kesempatan kerja. Pada level diferensiasi, 5 sampai 10, parameter dampak sebesar positif 911.996 lebih tinggi dari konstanta. Dampak kesempatan kerja dari diferensiasi level ini

berarti sebesar  $-934.373 + 911.996 = -22.477$ . Pada level diferensiasi 10 sampai dengan 20, parameter yang diperoleh 879.630. Ini berarti dampak terhadap kesempatan kerja dari diferensiasi kerja level ini adalah  $-934.374 + 879.630 = -55.744$ , terlihat diferensiasi upah ke atas yang makin lengkap/makin tinggi derajatnya menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja makin tinggi. Pada tabel diferensiasi harga di atas 20, dampak penyerapan tenaga kerja ditentukan sebesar negatif (-32.126).

Ketiga level diferensiasi upah ke atas tersebut menggambarkan hubungan yang negatif dan berfluktuasi dengan kesempatan kerja. Terakhir, pengaruh UMP yang tidak terdiferensiasi, yang hanya ditetapkan pada level terendahnya (UMP\_1) ditemukan pengaruh negatif yang rendah terhadap kesempatan kerja relatif dengan propinsi lain. Estimasi pengaruh UMP tunggal adalah  $-934.374 + 923.585 = -11.789$ .

Keseluruhan uraian di atas, hal-hal berikut dapat disimpulkan:

- Terjadi perbedaan penetapan UMP antar propinsi yang sangat variatif dibanding dengan PDRB perkapita propinsi masing-masing.

- b. Di propinsi-propinsi yang menetapkan UMSP, ternyata cenderung ditetapkan ke atas. Hal ini berarti terjadi kebijakan diferensiasi harga ke atas. Kebijakan tersebut berarti pula penyerapan konsumer surplus, tidak lain adalah daya beli perusahaan-perusahaan.
- c. Dari regresi tahap 2, dapat disimpulkan pengaruh negatif yang berfluktuasi dari penetapan derajat diferensiasi upah yang ada. Pengaruh negatif tertinggi pada derajat diferensiasi 20.

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Ternyata propinsi-propinsi yang melakukan diferensiasi upah atau menetapkan upah minimum sektoral mempunyai signifikansi yang beragam, misalnya, di atas lima jenis upah, cenderung mendiferensiasi ke atas (menghabiskan surplus pembeli yang relatif kaya). Hal ini disimpulkan dari data, propinsi tersebut sudah menetapkan UMP (Upah Minimum Propinsi) di atas rata-rata nasional, dimana UM rata-rata adalah 52 persen dari PDB.
2. Diferensiasi upah ke atas tersebut cenderung mengurangi penggunaan tenaga kerja. Kesempatan kerja rata-rata propinsi dengan UMSP yang makin terdiferensiasi, makin berkurang dengan besaran yang signifikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Age'nor, P.R. and JA Santaella (1998) Efficiency Wages Disinflation and Labor Mobility *Journal of Economic Dynamics and Control* Vol 22: 267-291.
- Akerlof G A (1982) Labor Contract as Partial Gift Exchange *Quarterly Journal of Economics* Vol 97 (November): 543-69.
- Akerlof GA and JLYellen (1988) Fairness and Unemployment *American Economic Review* Vol78 No2: 44-49.
- Allen S G (1995) Updated Notes on The Interindustry Wage Structure 1890 – 1990 *Industrial and Labor Relations Review* Vol 48 No2: 305 – 321.

### SARAN

Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang penelitian, diferensiasi upah sebenarnya sangat bermanfaat untuk mengkomodasi berbagai kemampuan membayar industri. Dengan demikian, penentuan UMSP yang terdiferensiasi akan berakibat positif terhadap kesempatan kerja. Hal ini berarti mawadahi pembeli marginal yang memiliki daya beli relatif rendah. Namun, diferensiasi upah di Indonesia ternyata cenderung dilakukan ke atas, yaitu menghabiskan surplus pembeli yang relatif kaya. UMSP yang dilakukan lebih cenderung memperbaiki tingkat *sharing* antara pekerja dan pengusaha dan bukan dilakukan untuk memperbesar kesempatan kerja. Oleh sebab itu disarankan agar propinsi yang ingin menetapkan kembali UMSP dilakukan dengan menetapkan basis UMSP yang relatif rendah, yaitu mendekati rata-rata rasio UM nasional terhadap PDB nasional yang dalam riset ini dilaporkan 52 persen. Untuk dapat melakukan hal ini, tentu saja harus dilakukan jeda beberapa tahun dengan hanya melakukan UMP atau UMK (Upah Minimum Kota). Setelah UMP dikerjar oleh UM rata-rata nasional, maka UMSP sebagai upaya mendiferensiasi harga yang bersifat pro, kesempatan kerja baru dapat dilaksanakan.

- Barth E and J Zweimüller (1995) Relative Wages under Decentralized and Corporatist Bargaining Systems *Scandinavian Journal of Economics Vol93 No3*: 369-384.
- Baswir R dkk (1999) *Pembangunan Tanpa Perasaan* IDEA Jogjakarta.
- Blanchflower DG AJ Oswald and P Sanfey (1996) Wages Profit and Rent Sharing *Quarterly Journal of Economics Vol CXI No1*: 227-251.
- Booth AL (1995) *The Economics of The Trade Union* Cambridge University Press Cambridge.
- Cahyono E 2002 Perburuhan dari masa ke masa: jaman kolonial Hindia belanda sampai Orde Baru – 1998 *Paper disiapkan untuk IUF Indoneisa Project Bandung 18 Juni 2002 Diakses dari internet [www.geocities.com/ypenebar/essays/kronikperburuhanhtm](http://www.geocities.com/ypenebar/essays/kronikperburuhanhtm) Lihat juga website Cahyono.*
- Christofides LN and A J Oswald (1992) Real Wage Determination and Rent-Sharing in Collective Bargaining Agreement *Quarterly Journal of Economics Vol107 No 3*: 985-1002.
- Dickens WT and LF Katz (1987) *Inter-Industry Wage Differences and Industry Characteristics* Dalam K Lang dan JS Leonard (eds) *Unemployment and The Structure of Labor Markets* Basil Blackwell Inc New York.
- Effendi TN (2000) *Pembangunan Krisis dan Arah Reformasi* Muhammadiyah University Press Surakarta.
- Elliot Robert F (1991) *Labor Economics: A Comparative Text*. McGraw-Hill London-New York.
- Fields J and EN Wolff (1995) Inter industry Wage Differentials and Gender Wage Gap *Industrial and Labor Relations Review Vol49 No1*: 105-120.
- Ghellab Y (1998) Minimum Wages and Youth Unemployment *Employment and Training Papers No 26 International Labor Organization*.
- Gujarati DN (1995) *Basic Econometric 3<sup>rd</sup> ed* McGraw-Hill Inc New York.
- Hasibuan N (1984) *Pembagian Tingkat Penghasilan Tenaga Kerja Pada Industri-industri Oligopolistik di Indonesia* Disertasi Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta .
- Hill H (1998) *Indonesia's Industrial Transformation* Institute of Southeast Asian Studies Singapore.
- Islam I and Nazara S (2000) Minimum wage and the welfare of Indonesian workers *International Labour Organization June 2000 Jakarta*.
- Manning C (1994) What Has Happened To Wages In The New Order? *Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol30 No. 3*: 73 – 114.
- Kennedy P (1992) *A Guide to Econometrics 3<sup>rd</sup> Eds* The MIT Press Cambridge.
- Kuncoro A tt *The Impact of Minimum Wages Seller Concentration and Other Cost of Doing Business on Entry: An Application of Nested Logit Model* LPEM-FEUI .

- Koutsoyiannis A (1977) *Theory of Econometrics* 2<sup>nd</sup> Eds Macmillan Hampshire.
- Kreps DM (1990) *A Course In Microeconomic Theory* Princeton University Press Princeton.
- Krueger AB and LH Summers (1987) *Reflection on The Inter-Industry Wage Structure* Dalam K Lang dan JS Leonard (eds) *Unemployment and The Structure of Labor Market* Basil Blackwell Inc New York.
- Krueger AB (1988) Efficiency Wages and Inter-Industry Structure *Econometrica* Vol.56, No. 2: 259-293.
- Lee BJ (1994) *Determination of Inter-Industry Wage Differential: A Case of The Korean Labor Market* PhD Dissertation University of Hawaii.
- Leibenstein H (1963) The Theory of Underemployment in Densely Populated Backward Areas Dalam GA Akerlof and JL Yellen (eds) 1987 *Efficiency Wage Models of The Labor Market* Cambridge University Press Cambridge.
- Long JE and A N Link (1983) The Impact of Market Structure on Wages Fringe Benefits and Turnover *Industrial and Labor Relations Review* Vol36 No2: 239-250.
- Manning C (1994) What Has Happened To Wages In The New Order? *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol30 No. 3: 73 – 114.
- McCafferty S (1990) *Macroeconomics Theory* Harper & Row Pubh New York.
- Peoples Jr (1994) Monopolistic Market Structure Unionization and Racial Wage Differential *The Review of Economics and Statistics* Vol 76 No1: 207-221.
- Pugel TA (1980) Profitability Concentration and The Interindustry Variation in Wages *The Review of Economics and Statistics* Vol62 No2: 248-253.
- Reenen J V (1996) The Creation and Capture of Rents: Wages and Innovation in a Panel of UK Companies *The Quarterly Journal of Economics* Vol CXI No 1: 195-225.
- Shapiro C and JE Stiglitz (1984) *Equilibrium* Unemployment as a Workers Discipline Device *American Economic Review* Vol74 No3: 434-444.
- SMERU (2001) Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id) diakses tanggal 5 April 2003.
- Slichter SH (1950) Notes on The Structure of Wages *The Review of Economics and Statistics* Vol32 No1: 80-91.
- Stiglitz JE (1974) Alternative Theories of Wage Determination and Unemployment in LDCS The Labor Turnover Model *Quarterly Journal of Economics* Vol 88: 194-227.
- Teal F (1996) The Size and Source of Economic Rent in a Developing Country Manufacturing Labor Market *The Economic Journal* Vol 106:963-976.
- Thomas RL (1997) *Modern Econometrics*: Addison-Wesley Harlow England.

Wachtel H M and C Betsey (1972) Employment at Low Wage *The Review of Economics and Statistics* Vol54: 121-128.

Weiss LW (1966) Concentration and Labor Earnings *American Economic Review* Vol56 (Mar): 96-117.